

## ANALISIS POLITIK MINYAK DI TIMUR-TENGAH

ISMAH TITA RUSLIN

Dosen Ilmu Politik pada Fak. Ushuluddin dan Filsafat

UIN Alauddin Makassar

e-mail: tee\_ruslin@yahoo.com

### Abstract

Middle East is a region full of conflicts both regional and international area, one of continuously conflict trigger is the oil factor, an available oil in the Middle East is a blessing and a disaster other side, since the discovery of oil resources, this region has always been the international spotlight, the several of political economy interests hold on there not only among region countries but also west countries involvement as foreign policy. Oil used as a tool and a political goal for the realization of national interests.

### Key Words

Oil, Politics, Middle East

### I. Pendahuluan

Pasca perang dunia II kawasan Timur-Tengah (*Middle East*) dipandang sebagai kawasan yang sangat strategis, dalam situasi global yang ditandai dominasi politik dan ekonomi negara-negara industri besar serta perebutan pengaruh antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) pada saat itu, letak Timur-Tengah sebagai penghubung benua Asia, Afrika dan Eropa dipandang sebagai kekuatan baru dan penting yang mulai turut diperbincangkan dalam percaturan politik dunia.

Keberadaan Timur-Tengah semakin menjadi penting dengan ditemukannya minyak sejak tahun 1930-an dalam jumlah yang sangat besar. Di tahun 1960-an, setiap tahunnya rata-rata ditemukan sumber minyak sebesar 47 miliar barel, yang sebagian besar berada di Timur Tengah. Semakin besar kecenderungan nasionalisasi perusahaan minyak di negara-negara OPEC, memaksa perusahaan minyak Barat berupaya untuk menemukan sumber minyak di kawasan lain. Namun penemuan sumber minyak di luar kawasan Timur Tengah menurun dari tahun ke tahun, pada 1970-an, volume temuan sumber minyak baru turun menjadi 35 miliar barel per tahun. Tahun 1980-an dan 1990-an, volume itu makin merosot menjadi masing-masing 24 miliar barel dan kemudian 14 miliar barel pertahun. Ini memperlihatkan, Timur Tengah tetap sumber minyak terpenting.<sup>1</sup> Diperkirakan dua pertiga cadangan

<sup>1</sup> Nanang Pamuji, Politik Minyak Dalam Konflik Internasional, dikutip dari <http://www.suarapembaruan.com/news/2004/09/01/editor/ed102.htm>

minyak dunia tersimpan di kawasan yang sebagian besar wilayahnya berpadang pasir dan tandus.

Letak yang strategis dan kandungan minyak melimpah sekaligus mengantarkan kawasan ini menjadi wilayah dengan skala potensi konflik yang tinggi. Dari sisi geografi politik, kawasan Timur Tengah dipandang Coher<sup>1</sup> sebagai "shatterbelt" suatu kawasan disebabkan letak yang sangat strategis sehingga menjadi ajang perebutan kekuatan-kekuatan besar dunia.

Pasca perang dunia II terbukti Timur-Tengah hampir tidak pernah surut dari konflik, tidak saja disebabkan berbagai kepentingan politik negara-negara internal kawasan tetapi wilayah ini juga menjadi tempat "bertemuinya" kepentingan negara-negara besar. Sejumlah negara-negara besar, seperti AS, Cina, Perancis, menggunakan berbagai cara mulai dari jalur diplomatik (*soft power*) hingga kekuatan militer (*hard power*) sebagai upaya untuk menjamin keamanan energi (minyak).<sup>2</sup> Hal ini bisa terefleksi dalam kebijakan luar negeri AS pasca perang dingin di kawasan Timur-Tengah dan Asia Tengah yang sarat dengan kepentingan ekonomi politik terkait minyak.

## II. Minyak Sebagai Senjata Politik

Sejak awal minyak merupakan bahan bakar utama yang paling dibutuhkan dalam peradaban industri, termasuk industri militer, teknologi dan komunikasi. Tidak mengherankan jika pentingnya minyak disadari benar dikalangan para politisi dan pakar strategi perang pada waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Clemenceau: "Setetes minyak sama nilainya dengan setetes darah prajurit kita dan siapa yang menguasai minyak maka akan menguasai power".<sup>3</sup> Sampai sekarang pun, minyak masih diyakini sebagai komoditas penting yang mempunyai nilai strategis, baik secara ekonomis maupun secara politis. Sehingga konsekuensinya dari segala persoalan yang bersangkutan paut dengan minyak pasti memiliki suatu prioritas tinggi dibidang industri, politik, ekonomi perdagangan, hingga kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Pada awalnya, kandungan minyak belum terasa manfaatnya bagi negara-negara di Timur Tengah, hal ini disebabkan sebagian negara-negara masih mengalami kelangkaan pengetahuan teknis dan secara ekonomis lemah, belum lagi beberapa diantaranya masih berada di bawah kontrol negara-negara kolonial,

<sup>1</sup> Alasdair Drysdale and Gerald Blake, 1985, *The Middle East and North Africa a Political Geography*, New York, Oxford Press, p. 27

<sup>2</sup> Alexander Betts, *The International Politics of Oil*, St. Antony's International Review, Vol 2, No. 1, May, 2006, p. 3

<sup>3</sup> Aspiannoor Masrie, *Politisasi Minyak*, *Harian Tribun Timur*, 20 September 2005



sehingga dapat dipastikan hampir semua kebijakan yang menyangkur eksplorasi, produksi serta pemasaran dikendalikan oleh pemerintahan kolonial pada waktu itu.

Kesadaran akan berkah ini mulai timbul ketika sejumlah negara-negara penghasil minyak antara lain Irak, Arab Saudi, Kuwait menuntut dinaikkannya harga minyak dan pemberian royalti yang lebih besar dari koloni agar supaya posisi "bargaining" lebih kuat. Hal ini pulalah yang mendorong negara-negara di atas membentuk kartel minyak internasional OPEC pada tahun 1960 di Baghdad, yang keanggotaan awalnya terdiri dari Arab Saudi, Iran, Kuwait, Irak, dan dan Venezuela.

Hingga pada perang Yom Kippur (Arab-Israel) tahun 1973, minyak menjadi senjata politik yang ampuh bagi negara-negara Arab dengan menjatuhkan embargo terhadap negara-negara barat, sebagai hukuman atas dukungannya terhadap Israel. Langkah ini membuat harga minyak dunia pada saat itu melonjak empat kali lipat menjadi hampir US\$ 12 per barrel.<sup>5</sup> Kondisi ini cukup mengganggu perekonomian AS dan Eropa Barat dengan memaksa negara-negara barat melakukan berbagai penghematan, di AS frekuensi penerbangan dibatasi, larangan berjualan bensin pada hari minggu dikontrol ketat, bahkan di Inggris pemerintahnya mengeluarkan keputusan mewajibkan semua pabrik dan industri mengurangi pemakaian tenaga listrik sampai 65%, hal yang tidak jauh berbeda juga melanda Belanda, Perancis, Belgia, Jerman Barat.<sup>6</sup> Embargo minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi tersebut juga mampu mengguncang aliansi Atlantik (NATO), membuat negara-negara Eropa Barat berlomba merebut simpati negara-negara Arab dengan menyatakan dukungan pada tuntutan Arab dalam mencari perdamaian Arab-Israel dan mulai mengabaikan peringatan-peringatan AS sebagai pemimpin persekutuan Atlantik. Keretakan persekutuan Atlantik akibat embargo membuat AS terkejut bahwa ternyata minyak mampu menjadi power yang cukup efektif dalam mempengaruhi sendi-sendi perekonomian internasional.

Menyadari arti pentingnya minyak sebagai sumber energi utama dan dapat dijadikan alat politik dalam mempengaruhi politik dunia, maka negara-negara Arab mengkaji ulang kebijakan yang ditempuh selama ini terhadap perusahaan-perusahaan besar minyak Amerika dan Eropa yang telah menguasai eksploitasi minyak mereka, antara lain: *Standard Oil of California (Socal)*, *Texas Company (Texaco)*, *Standard Oil of New Jersey (Exxon)*, *Socony-Vacuum Oil Company (mobile)*, *British Petroleum and Royal Dutch Shell*, *Campagnie Francaise des Petroleum (CFP)* dan *Ente Nazionale Indrocarbuni (ENI)*.

<sup>5</sup> Perang Minyak Setelah Arab Menutup Kran, dikutip dari <http://majalahahtempointeraktif.com/id/arsip/1973/12/22/ln/mbm.19731222.ln63567.id.html>

<sup>6</sup> *Ibid*

Kehadiran perusahaan-perusahaan Asing, dirasakan hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan merugikan negara penghasil (produsen) minyak. Menyadari hal tersebut, maka negara-negara Arab mengambil alih kontrol minyaknya untuk dinasionalisasikan. Iran-misalnya, menyatakan secara tegas untuk segera menasionalisasikan kekayaan pertambangan dan penyulingan minyaknya, meski harus dibayar mahal dengan rencana kudeta Mosaddegh pada tahun 1951 melalui Operasi Ajax oleh pihak Inggris dengan menggandeng agen CIA.

Keampuan politik minyak, dapat diukur dari kapasitas yang melekat didalamnya, dimana perubahan pasar minyak pasti berkorelasi pada perubahan distribusi kekuasaan politik.<sup>7</sup> Kasus menarik mengenai hal ini, bisa dilihat pada dramatisasi energi minyak yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam mempergunakan minyaknya sebagai instrumen politik untuk memperkuat kapabilitas politik luar negerinya di fora internasional.

Dan karena minyak juga, AS melalui kebijakan luar negerinya mampu membangun persekutuan dengan negara-negara emirat teluk berjuluk "petrodollar" dan tetap konsisten memayungi kepentingan Israel. Suatu kebijakan luar negeri umum suatu negara dapat dikaitkan dengan sifat, sikap dan kebutuhan ekonomi domestiknya.<sup>8</sup> Di sisi lain ironi bagi negara-negara Arab, menjadikan minyak sebagai senjata politik Arab melawan Israel dan pendukungnya seperti pada tahun 1973, nampaknya sesuatu hal yang sulit dilakukan. Pertama dunia kini tak sangat tergantung lagi pada minyak OPEC, kedua, Integritas negara-negara Arab kaya minyak kini dipertanyakan, negara-negara teluk khususnya Arab Saudi kini menjadi kawan baik AS untuk kepentingan ekonomi, meski demikian seruan untuk dunia Islam agar melawan Israel dengan menyetop ekspor minyak ke Israel dan negara-negara pendukungnya tetap disuarakan oleh Iran yang merupakan musuh politik utama Israel dan AS.

Namun ada yang menarik bagi Iran, ditengah ancaman serangan AS dan Israel akibat isu nuklirnya, Iran balas mengancam akan menutup selat Hormuz di wilayahnya yang merupakan jalur utama transportasi strategis minyak dunia, semua kapal atau transportasi minyak dari dan ke teluk Persia-Laut Arab-Samudera Hindia dipastikan melalui selat ini, hal ini berkali-kali diserukan Pemerintah Iran dan cukup mengkhawatirkan AS mengingat penutupan Selat Hormuz berarti bencana besar bagi suplai minyak AS.

<sup>7</sup> Aspian, Op. Cit

<sup>8</sup> K.J Holsti, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, 1988, Penerbit Erlangga, Jakarta, h.



### III. Konflik Internal Kawasan

Faktor keberadaan minyak yang banyak terdapat di negara-negara Asia Barat turut mempengaruhi eskalasi konflik di kawasan ini. Jika dibandingkan dengan Afrika Utara, intensitas konflik di kawasan Asia Barat lebih tinggi, mulai dari konflik interen regional, maupun konflik skala internasional dengan keterlibatan pihak asing yang berkepentingan di kawasan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik minyak di kawasan ini;

Pertama, keberadaan sumber minyak tidak merata, adanya perbedaan yang mencolok antara negara yang memiliki minyak melimpah seperti Irak, Iran, Arab Saudi dan negara-negara emirat di Teluk Parsi (Bahrain, Qatar, UEA, Kuwait, Oman) dengan negara-negara seperti Syria, Aljazair, Libya, Mesir (untuk beberapa waktu) yang memiliki sumber minyak lebih sedikit dibanding negara-negara yang berada di teluk. Berkah minyak untuk negara-negara emirat di teluk, secara politis nampaknya berpengaruh terhadap kepentingan kebijakan luar negeri mereka, yang cenderung "berdamai" dengan Barat, kecuali Irak dan Iran untuk kepentingan ekonomi (dollar). Disinyalir hal ini jugalah yang sampai kini menghambat gerakan persatuan Arab.<sup>9</sup>

Kedua, berkah minyak nampaknya juga menjadi masalah bagi beberapa negara rentier state di Timur-Tengah, mereka terjangkit Deutch disease yaitu suatu keadaan yang dialami oleh suatu negara yang hanya menggantungkan eksistensinya terhadap satu produk saja (minyak). Irak misalnya, minyak selalu menimbulkan kegelisahan Irak karena komoditas itu sebagai satu-satunya kekuatan yang dimiliki Irak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan juga menjadi tawar-menawar di dunia internasional. Jika terjadi krisis pada sektor minyak, tidak ada komoditas lain yang dapat diandalkan Irak.<sup>10</sup>

Ketiga, konsentrasi minyak umumnya berada di daerah yang mempunyai potensi konflik yang tinggi seperti di Kota Kirkuk dan Mosul adalah tempat

<sup>9</sup> Dunia Arab meskipun memiliki kesatuan linguistik dan kulturil, bukan sesuatu yang seragam. Hal ini dapat disaksikan dengan adanya perpecahan antara negara-negara konservatif dan revolusioner, yang pro-barat dan anti barat, yang kaya dan miskin, yang fanatik Islam, dan yang terbuka untuk modernisasi dan pembaharuan. Pada umumnya pro barat seperti Libanon, Jordania, Maroko, Arab Saudi dan emirat-emirat di sekitar teluk, sedangkan Irak, Syria, Libya, Aljazair dikenal anti barat. Di lain pihak Irak, Syria, Yaman dan Mesir untuk beberapa waktu mempunyai hubungan erat dengan negara-negara blok komunis, sedangkan Arab Saudi, Sudan, Libya, Yordania, Libanon dapat dikatakan anti komunis. Adapun Mesir, Syria, Irak, Sudan, Aljazair, Yaman dapat digolongkan negara-negara revolusioner, sedangkan Arab Saudi, Jordania, Maroko, Kuwait dan negara-negara Teluk Parsi masuk kategori negara konservatif, biarpun mereka terbuka untuk modernisasi.

<sup>10</sup> Mustafa Abdul Rahman, *Gelot Irak Menuju Era Pasca Saddam*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, Hal.61

cadangan minyak Irak terbesar, dimana di daerah itu merupakan basis dari suku Kurdi yang merupakan musuh dari Pemerintah Irak.

Keempat, keterlibatan pihak asing (AS), seperti pada konflik Suku Kurdi dan Pemerintah Irak yang semakin parah dengan keterlibatan AS dalam memanfaatkan situasi. AS secara nyata mendukung pemberontakan Suku Kurdi yang ingin lepas dari Irak dengan tujuan adu domba, memecah belah agar dengan mudah menguasai minyak Irak.<sup>11</sup>

Keberadaan minyak menjadi semakin dilematis, disatu sisi merupakan berkah sang pencipta, menjadi kekuatan bagi negara-negara penghasil minyak dikawasan ini, namun disisi lain atas nama kepentingan ekonomi masing-masing negara, minyak justru memicu konflik internal negara-negara penghasil minyak dan menjadi penghambat integritas negara-negara kawasan.

Dari sudut pandang geopolitik, konflik Irak dan Iran berawal ketika kedua negara memperebutkan kepemilikan Shatt al-Arab, yaitu tempat bertemunya Sungai Eufrat dan Sungai Tigris sepanjang 80 km. Wilayah ini menjadi vital bagi kedua belah pihak untuk jalur minyak ke Teluk, apalagi setelah diketemukannya sumber minyak di Abadan, Iran. Kedua negara sepakat menandatangani perjanjian Aljiers dengan membelah Shatt al-Arab bagi pelayaran Irak dan Iran, dengan imbalan Iran tidak akan menghasut atau membantu pemberontakan Suku Kurdi, namun perjanjian ini dicabut sepihak oleh Irak ketika meletus revolusi di Iran tahun 1979.<sup>12</sup>

Peristiwa lainnya terjadi antara tahun 1990-1991, Irak terlibat dalam krisis teluk yang kemudian pecah menjadi konflik terbuka dengan tetangganya Kuwait. Baghdad menuduh Kuwait telah "merampok" sumber minyak Irak (di daerah Ramallah yang dipersengketakan Irak dan Kuwait), senilai 2,4 milyar dollar AS.<sup>13</sup> Tuduhan lainnya adalah bahwa Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) telah "menohok Irak dari belakang", mereka berhasil membanjiri minyak dunia yang mengakibatkan kerugian dipihak Baghdad senilai 14 milyar dollar AS, akibat pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan Kuwait dan UEA tersebut, harga minyak memang sempat anjlok sampai 15 dollar per barrel.<sup>14</sup> Dan Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditi utamanya sempat terpukul dengan anjloknya harga minyak di pasaran internasional.

Dipengaruhi faktor geografis "land locked country", Irak menghadapi kesulitan ketika harus mengekspor minyaknya, khususnya melalui laut. Keadaan

<sup>11</sup> Siti Mut'ah Setyawati dkk, *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika*, PPMTT Jurusan HI, Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Deplu RI, Yogyakarta, 2004, h.124

<sup>12</sup> *Ibid*, h.122

<sup>13</sup> Riza Sihbudi, 1991, *Bara di Timur-Tengah*, Penerbit Mizan, Bandung, hal 36

<sup>14</sup> *Ibid*



geografis tersebut menjadi alasan pembenar kedua bagi Irak untuk menganeksasi tetangganya Kuwait, dengan demikian pantainya menjadi lebih panjang dan akses lautnya bertambah lebar untuk transportasi minyak, termasuk keberadaan dua pulau, yaitu Warbah dan Bubiyan, juga sekaligus dapat dianeksasi. Tidak keliru jika akhirnya minyak disinyalir menjadi penyebab utama lemahnya integrasi negara-negara Arab.

#### IV. Faktor Amerika Serikat

Tidak dapat dipungkiri, AS menjadi salah satu faktor penyebab polemik minyak yang menentukan signifikansi politik di kawasan Timur-Tengah. Penasehat Kementerian Dalam Negeri AS, Arthur C. Millspaugh (1920) sejak awal menegaskan: "Petroleum supplies were basic to American Industry, prosperity, well being, and security.... it is economically essential... to obtain assured foreign supplies of petroleum."<sup>15</sup> Presiden Jimmy Carter (1976-1980), dalam menetapkan prinsip Carter kembali mengharuskan AS mengamankan dengan segala cara suplai minyaknya. Prinsip tersebut menegaskan bila muncul ancaman, maka harus menggunakan segala cara termasuk kekuatan militer untuk menjamin terus mengalirnya suplai minyak.<sup>16</sup> Dan pada era Bush pemerintah membentuk National Energy Policy Development Group (NEPDG) yang tugasnya merancang kebijakan guna memenuhi kebutuhan energi AS.

AS mulai memberi perhatian pada minyak di Timur Tengah pasca Perang Dunia (PD) II, selama perang berlangsung, surplus minyak AS pasca penemuan ladang minyak di Texas dan Oklahoma 1930 berkurang drastis, sekitar 6 milyar barrel minyak digunakan oleh sekutu selama perang berasal dari AS,<sup>17</sup> pemerintah mulai khawatir persediaan minyak AS akan habis. Menyikapi hal tersebut, Kongres AS segera menggelar sidang khusus untuk mengeluarkan keputusan tentang jumlah minyak yang harus diimpor AS setiap bulannya, mengingat cadangan minyak yang dimiliki AS hanya 0,3 % dari cadangan minyak dunia, sedangkan kebutuhan konsumsinya mencapai 23%.<sup>18</sup> Jika tidak ada suplai tambahan dalam beberapa tahun mendatang, diperkirakan akan sulit bagi AS untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Perhatian AS pada minyak di Timur Tengah semakin besar setelah aksi embargo minyak Arab menyusul Perang Arab-Israel tahun 1973 yang sangat merugikan AS. Atas dasar kepentingan minyak itulah, kebijakan politik luar negeri

<sup>15</sup> See Mustafa, *Op. Cit.*, h. 134

<sup>16</sup> Mustafa Abd Pakamani, *Op. Cit.*, hal. 57-58

<sup>17</sup> The Politics of Oil, dalam <http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/oil.cfm>

<sup>18</sup> See Mustafa Setyawan, *Op. Cit.*, hal. 70

AS di Timur Tengah bersifat *double standard* bersekutu dengan raja-raja minyak di teluk (Arab Saudi, Qatar, UEA, Bahrain) dan sebaliknya bersikap represif, bahkan melakukan intervensi terhadap rezim-rezim penguasa di Timur Tengah yang dipandang menghalangi hegemoninya di kawasan tersebut, melalui berbagai rekayasa atas nama demokrasi, keamanan global, seperti apa yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Pengamat politik dan strategi asal Mesir, Taha Majdub dalam sebuah artikelnya di harian Al-Ahram 12 Mei 2002 mengatakan:<sup>19</sup> "tujuan tersirat dari ancaman serangan AS ke Irak adalah keinginan Washington menguasai minyak kawasan teluk dan Irak yang dibungkus atas nama demokrasi, anti-terorisme ataupun anti senjata pemusnah massal". Hal serupa diungkapkan Simon Bromley; "industri minyak telah mempengaruhi kebijakan AS di Timur-Tengah"<sup>20</sup>.

Pasca runtuhnya Saddam Husein, negara seribu satu malam ini justru semakin menderita. Dalam perspektif politik minyak, serangan militer untuk menguasai Irak menjadi opsi yang paling realistis, dengan resolusi DK-PBB 1483 Mei 2003 yang mencabut sanksi ekonomi terhadap Irak, kini perusahaan AS seperti Halliburton, Kellogg Brown and Root, MCI World Com, Betchel Group, Flour Corps, Parson Group dll, menguasai dan mengontrol pengelolaan minyak di Irak.<sup>21</sup> Bila harga minyak tiba-tiba merosot US\$ 10 saja, AS diperkirakan akan kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$ 100 milyar.<sup>22</sup> Pasca pencabutan sanksi Pentagon mengumumkan bahwa perusahaan Prancis, Jerman dan Rusia dilarang ikut tender minyak yang dibiayai AS dengan alasan "melindungi keamanan esensial AS".

Kebijakan luar negeri AS lainnya yang bermotif ekonomi (minyak) tergambar pada konflik Suku Kurdi dan Pemerintah Irak, ketergantungan Irak akan Kota Kirkuk dan Mosul dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mencari dukungan dan menghasut suku Kurdi agar memisahkan diri dari Irak. Tampaknya dukungan Amerika atas suku Kurdi lebih pada alasan agar konsesi minyak di wilayah Kurdi, khususnya Kirkuk dan Mosul jatuh ketangan perusahaan-perusahaan Amerika. Hal yang sama juga terlihat dari tujuan strategis AS dalam melakukan serangan ke Afghanistan beberapa waktu lalu, tujuan gempuran AS atas Afghanistan untuk menumbangkan kekuatan Taliban dan membasmi jaringan Al-Qaeda hanyalah "akal-akalan" AS, yang tersirat dibalik itu adalah menguasai kawasan Asia Tengah dan Laut Kaspia yang kaya minyak dan menempatkan pengaruhnya disana

<sup>19</sup> Ibid, hal.59

<sup>20</sup> Dalam Alexander Betts, *Op. Cit*, p.5

<sup>21</sup> Nanang, *Op. Cit*

<sup>22</sup> Riza Sihbudi, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, PT. Mizan Publika, Jakarta, h.155



Ketika lahan domestik terbatas, NEPDG mengajukan proposal lainnya dengan membuka peluang impor minyak dari berbagai kawasan, antara lain wilayah Laut Kaspia terdiri dari Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan beberapa bagian wilayah dari Iran dan Rusia. Menurut Departemen Energi AS, diperkirakan kawasan itu menyimpan 233 miliar barel minyak.<sup>23</sup> Demikian halnya posisi Afrika Barat juga cukup penting bagi AS. Meskipun pada tahun 2000 wilayah itu hanya menghasilkan 10 persen dari produksi global, akan tetapi diperkirakan akan meningkat menjadi 25 persen pada tahun 2020.

Dengan menguasai ladang-ladang minyak khususnya di Kawasan Timur Tengah maka AS akan dapat mengendalikan para pesaing industrinya dalam penguasaan ekonomi dunia. Terutama para pesaing yang juga memiliki ketergantungan besar pada minyak Timur Tengah, seperti Eropa dan Jepang, menyusul industrialisasi di Cina dan India yang makin "haus" akan kebutuhan energi minyak yang makin besar dari tahun ke tahun.

## V. Kesimpulan

Fenomena minyak di Timur Tengah adalah berkah sekaligus bencana, minyak tidak hanya mengandung nilai ekonomis tapi juga strategis dan politis, minyak dapat mempengaruhi isu politik luar negeri, pembangunan, konflik, serta kerjasama internasional. Tidaklah mengherankan jika minyak dianggap pemicu konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur-Tengah. Kondisi ini di perparah dengan keterlibatan pihak-pihak asing khususnya Amerika Serikat. Walaupun negara-negara industri maju, terutama AS, telah berupaya keras untuk mendiversifikasikan sumber impor minyak mereka, namun ketergantungan terhadap Timur Tengah atau Teluk Persia khususnya masih cukup besar, dan secara politis akan tetap dipertahankan AS atas nama hegemoni kapitalisme. Kebijakan AS di Timur-Tengah inilah yang akhirnya berpengaruh terhadap integrasi negara-negara Arab. Akhirnya faktor geografis serta kebutuhan akan sumberdaya alam seringkali dapat dikaitkan dengan pilihan orientasi suatu negara dalam mengambil kebijakan politik atas dasar kepentingan dan keamanan nasional.

<sup>23</sup> Nanang, *Op.Cit*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustafa Rahman, *Celiat Irak Menuju Era Pasca Saddam*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003
- Betts, Alexander *The International Politics of Oil*, *St. Antony's International Review*, Vol 2, No.1, May, 2006
- Drysdale Alasdair and Gerald Blake, *The Middle East and North Africa a Political Geography*, New York, Oxford Press, 1985
- Holsti, K.J, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988
- Muti'ah Siti Setyawati dkk, *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika*, PPMTT Jurusan HI, Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Deplu RI, Yogyakarta, 2004
- Sihbudi, Riza, *Menyandera Timur Tengah*, PT. Mizan Publika, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Bara di Timur-Tengah*, Penerbit Mizan, Bandung, 1991
- Harian Tribun Timur, 20 September 2005
- <http://www.suarapembaruan.com/news/2004/09/01/editor/edio2.htm>
- <http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/oil.cfm>
- <http://majalahtempointeraktif.com/id/arsip/1973/12/22/ln/mbm.19731222.ln63567.id.html>